

**PEMBERDAYAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)  
SARI MAKMUR OLEH PEMERINTAH DESA SIDASARI  
KECAMATAN CIPARI KABUPATEN CILACAP**

**Desi Fitriani<sup>1</sup>, Sirojul Munir<sup>2</sup>, Ari Kusumah Wardani<sup>3</sup>**

*Univversitas Galuh, Ciamis, Indonesia<sup>1,2,3</sup>*

E-mail : desifitriani934@gmail.com

**ABSTRAK**

*Desa Sidasari merupakan desa yang mempunyai badan usaha milik desa (BUMDes) yang bergerak dibidang jasa. Masalah yang ditemui yaitu Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sari Makmur di Desa Sidasari Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap dilakukan oleh Pemerintah Desa belum berjalan dengan baik. Penelitian ini dilakukan karena adanya permasalahan dimana tidak adanya perkembangan terkait dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sari Makmur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sari Makmur oleh Pemerintah Desa Sidasari Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap. Teori yang digunakan yaitu teori dari Mardikanto dan soebianto menunjukkan bahwa pemberdayaan merupakan suatu proses yang salah satunya adalah proses penguatan kapasitas yaitu yang terdiri dari Penguatan Kapasitas Individu, Penguatan kapasitas entitas (kelembagaan), dan Penguatan Kapasitas Sistem (jejaring). Desain penelitian menggunakan deskriptif analisis, peneliti akan menguraikan data-data yang ada, menguraikan situasi yang terjadi dan proses yang bertujuan untuk pemecahan masalah yang terjadi saat ini. Sumber data diperoleh langsung dari informan melalui observasi dan wawancara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Teknik pengolahan/analisis data dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sumber data terdiri dari data primer dengan 6 orang informan dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sari Makmur oleh Pemerintah Desa yang diukur dengan 3 dimensi dan terdiri dari 8 indikator dapat diketahui bahwa 2 indikator sudah berjalan dengan cukup baik dan 6 indikator belum berjalan dengan efektif. Hal tersebut dikarenakan masih terdapat beberapa hambatan diantaranya yaitu anggaran yang ada masih belum mencukupi untuk melaksanakan kegiatan pelatihan dan sarana prasarana yang masih belum terpenuhi karena anggaran yang tidak mencukupi. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan mengoptimalkan pendapatan asli desa supaya pelaksanaan pelatihan kemampuan dapat terlaksana secara rutin dan akan memaksimalkan Anggaran Pendapatan Belanja Desa untuk*

*pembangunan sarana prasarana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sari Makmur.*

**Kata Kunci :** *Pemberdayaan, Badan Usaha Milik Desa*

## **PENDAHULUAN**

Desa adalah suatu wilayah yang ditinggali oleh sejumlah orang yang saling mengenal, hidup bergotong royong, memiliki adat istiadatnya yang relatif sama, dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatannya. Desa ialah suatu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri (Soetardjo, 1984:16). Penduduk desa umumnya berasal dari satu keturunan (geneologi) sehingga mempunyai sistem kekerabatan yang erat. Mata pencaharian penduduknya umumnya dibidang pertanian. Masyarakat desa yang dicirikan seperti itu disebut sebagai masyarakat yang bersifat komunal, hidup dalam kebersamaan. Masyarakat yang bersifat komunal mempunyai ciri kebersamaan yaitu saling mengenal, bahu-membahu, gotong royong dalam memecahkan masalah bersama/umum, dan menghormati nilai kebersamaan. Masyarakat dengan ciri demikian disebut sebagai kesatuan masyarakat. Maksudnya adalah kesatuan masyarakat yang terikat oleh tata cara tertentu yang mengatur perkehidupannya sendiri.

Didalam Peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang terdapat pada pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa Pemerintahan

Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Masyarakat desa terikat oleh kesamaan sistem nilai sosial dan budaya. Selain itu, disebutkan juga bahwa yang dimaksud dengan Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Untuk meningkatkan perekonomian desa didirikan suatu lembaga yang dikelola penuh oleh masyarakat desa, lembaga ekonomi ini tidak lagi didirikan menurut instruksi pemerintah tetapi keinginan masyarakat desa, mulai dari pengelolaan potensi akan menimbulkan permintaan pasar. Lembaga itu bertujuan membantu kebutuhan dana masyarakat bersifat konsumtif dan produktif, menjadi distributor utama untuk memenuhi kebutuhan dan menumbuhkembangkan kegiatan pelaku ekonomi diperdesaan. Bentuk kelembagaannya dinamakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Badan Usaha Milik Desa telah di amanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) harus

disertai upaya penguatan kapasitas dan didukung oleh kebijakan daerah yang memfasilitasi serta melindungi usaha tersebut dari ancaman persaingan pemodal besar. Badan Usaha Milik Desa adalah pilar kegiatan ekonomi didesa yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial. Badan Usaha Milik Desa sebagai lembaga sosial itu berfokus pada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya pada penyediaan pelayanan sosial. Badan Usaha Milik Desa sebagai lembaga komersial itu bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal ke pasar.

Sebagai badan usaha yang menjalankan kegiatan-kegiatan pengembangan ekonomi desa, pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) harus dikelola secara transparan, profesional dan berkeadilan. Setiap Badan Usaha Milik

Desa (BUMDes) pasti ada yang berkembang dan tidak berkembang, hal tersebut tergantung kepada pihak yang mengelola badan usaha tersebut. Sama halnya dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), lembaga yang ada di setiap desa tersebut tidak semua berkembang dan memajukan ekonomi desa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi salah satu organisasi yang harus diberdayakan seperti yang terdapat dalam Peraturan Desa Sukahurip Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Dasar BUM Desa Sari Makmur.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sari

Makmurdi Desa Sidasari Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap terlihat bahwa pelaksanaan pemberdayaan oleh Pemerintah Desa tidak berjalan dengan baik. Hal itu terlihat dari adanya indikator-indikator sebagai berikut :

1. Pemerintah Desa belum melakukan sosialisasi mengenai permodalan untuk mengembangkan BUMDes, contohnya dengan meminjam permodalan ke bank.
2. Pemerintah Desa belum mengikutsertakan pengurus dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan mengenai pemberdayaan BUMDes, contohnya melalui pelatihan atau pendidikan untuk meningkatkan kemampuan kerja pengurus dalam mengelola BUMDes agar bisa lebih maju dan berkembang.
3. Pemerintah Desa belum bisa menggerakkan pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sari Makmur, untuk bekerja sama dengan pihak masyarakat pemilik usaha home industry, sehingga BUMDes belum bisa membuka usaha dibidang konsumsi, padahal potensi itu ada, contohnya di desa tersebut terdapat home industry sale pisang yang mana bisa diajak untuk kerjasama.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah yaitu : bagaimana pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sari

Makmur oleh Pemerintah Desa Sidasari Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap?

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan penelitian deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, studi kepustakaan dan studi dokumentasi.

Adapun informan dalam penelitian ini terdiri dari enam orang yaitu Kepala Desa Sidasari, Sekretaris Desa Sidasari, Ketua Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sari Makmur, dan tiga orang pengguna jasa Badan Usaha Milik Desa BUMDes Sari Makmur yaitu. Selanjutnya setelah data diperoleh maka dilakukan pengolahan data melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Upaya untuk mengetahui pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Manggala Hurip oleh Kepala Desa Sukahurip Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis, dilakukan dengan penelitian dengan menggunakan tiga dimensi yaitu : Penguatan Kapasitas Individu, Penguatan Kapasitas Entitas (kelembagaan), dan Penguatan Kapasitas Sistem (jejaring).

### **1. Penguatan Kapasitas Individu**

Pengembangan kapasitas individu adalah segala upaya untuk memperaiki atau mengembangkan mutu karakteristik pribadi agar lebih efektif dan efisien baik dalam

entitasnya maupun dalam lingkungan global. Pengembangan kapasitas individu meliputi pengembangan kapasitas kepribadian, kpsitas di dunia kerja dan pengembangan kapasitas keprofesionalan.

Berdasarkan hasil penelitian, dari ketiga indikator menunjukkan bahwa dimensi Penguatan Kapasitas Individu belum berjalan dengan baik. Hal ini dilihat dari kepribadiannya belum semua anggota BUMDes mempunyai kepribadian yang baik dan masih banyak yang saling mengandalkan, untuk meningkatkan kepribadiannya pihak pemerintah desa akan mengadakan kegiatan pelatihan kemampuan kepada anggota agar kepribadian anggota menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya untuk pengembangan kapasitas di dunia kerja terlihat anggota BUMDes masih ada yang menyepelekan tugasnya, sebagian dari mereka ada yang selalu menunda tugasnya hingga menumpuk. Dan untuk pengembangan kapasitas keprofesionalan bisa dikatakan belum profesional sepenuhnya, hal ini terlihat dari adanya sebagian anggota BUMDes yang masih belum bisa menyelesaikan tugasnya dan bersikap seenaknya.

Hal tersebut tidak sesuai dengan pendapat dari Mathis (2002) mengatakan bahwa “Pengembangan karyawan adalah usaha-usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan karyawan dalam lingkungan pekerjaan untuk menghadapi berbagai penugasan”.

Dari teori diatas dapat dikatakan bahwa seorang anggota organisasi harus mengembangkan kepribadiannya serta membangun daya dirinya sendiri menjadi lebih baik dalam dunia kerja, hal tersebut berguna untuk kemajuan dari organisasi. Anggota organisasi harus bisa memiliki cara agar dapat mendorong dirinya sendiri menjadi lebih baik saat mejadi salah satu anggota organisasi. Karena keberhasilan suatu organisasi tergantung pada anggota organisai yang menjalannkannya, jika anggota organisasi mempunyai kemampuan didalam dunia kerjanya maka organisasi tersebut akan maju dan berkembang. Dalam pengembangan kapasitas di dunia kerja anggota organisasi belum sesuai dengan teori yang sudah disebutkan di atas karena setiap anggota organisasinya belum mengembangkan kepribadiannya dalam dunia kerja untuk meningkatkan potensinya di dunia kerjanya sehingga belum mempunyai kesadaran dan potensi untuk menjadi anggota organisasi yang lebih baik dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan.

Hambatan pada dimensi penguatan kapasitas individu yaitu anggaran yang belum mencukupi untuk melaksanakan kegiatan pelatihan secara rutin dan anggota Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) masih banyak yang lebih mementingkan kepentingan pribadi dibandingkan dengan kepentingan organisasi karena merasa tidak diberi upah yang maksimal.

Upaya yang dilakukan pada dimensi penguatan kapasitas individu untuk mengatasi hambatan yang timbul terkait ketiga indikator tersebut yaitu dengan mengoptimalkan pendapatan asli desa supaya pelaksanaan pelatihan kemampuan anggota BUMDes dapat terlaksana secara rutin, dan berusaha mengembangkan usaha BUMDes agar bisa memberikan upah yang maksimal terhadap anggotanya supaya anggota tidak bersikap seandainya dalam bekerja.

## **2. Penguatan Kapasitas Entitas (Kelembagaan)**

Berbeda dengan pengembangan kapasitas individu (pribadi) yang lebih menekankan pada kualitas individu untuk dirinya sendiri, pengembangan kapasitas entitas (kelembagaan) lebih menekankan kepada pengembangan mutu entitas/organisasi. Penguatan kapasitas entitas (kelembagaan) difokuskan kepada sumberdaya pengembangan hampir seluruhnya mengenai permasalahan sumberdaya manusia, proses dan struktur organisasi.

Salah satu unsur yang mempengaruhi keberhasilan pemberdayaan yaitu penguatan kapasitas entitas (kelembagaan) dengan indikator adanya kejelasan struktur organisasi, kompetensi dan strategi yang akan ditempuh untuk tercapainya tujuan/efektivitas organisasi, adanya pengembangan jumlah dan mutu sumberdaya yang mencakup sumberdaya manusia, sumberdaya finansial, sumberdaya informasi,

maupun sarana dan prasarana, adanya interaksi antara entitas organisasi dengan pemangku kepentingan (stakeholders) yang lain.

Berdasarkan hasil penelitian, dari ketiga indikator menunjukkan bahwa dimensi Penguatan Kapasitas Entitas (Kelembagaan) belum berjalan dengan baik. Hal ini dilihat dari strategi yang sudah direncanakan belum sepenuhnya berhasil. Selanjutnya untuk indikator adanya pengembangan jumlah dan mutu sumberdaya dapat dikatakan sudah cukup optimal, hanya saja terkait dengan sumberdaya sarana prasarana yang sama sekali belum memenuhi standar. Kemudian untuk indikator adanya interaksi antara entitas organisasi dengan pemangku kepentingan yang lain masih terdapat beberapa faktor yang menjadikan interaksi antara entitas dengan pemangku kepentingan yang lain belum berjalan dengan baik, faktor tersebut yaitu kurangnya komunikasi yang baik antar lembaga.

Hal tersebut tidak sesuai dengan pendapat dari Moeharioo (2014:8) mengatakan bahwa :“Perkembangan kompetensi pada setiap organisasi harus dikembangkan seluas-luasnya dalam rangka mengembangkan manajemen sumber daya manusianya”.

Dari teori di atas dapat diketahui bahwa dalam pemberdayaan harus adanya kemampuan kompetensi dari setiap anggota organisasi, kemampuan dan keberanian untuk memilih termasuk memilih strategi yang akan ditempuh dalam organisasi untuk

tercapainya suatu tujuan organisasi. Dalam kejelasan struktur organisasi, kompetensi dan strategi yang akan ditempuh untuk tercapainya tujuan organisasi belum sesuai dengan teori yang sudah disebutkn di tas karena anggota orgnisasi belum mempunyai kemampuan untuk mengambil keputusan dengan baik dan berpendapat untuk mengungkapkan ide atau gagasannya.

Hambatan pada dimensi penguatan kapasitas entitas (kelembagaan) yaitu pada indikator adanya kejelasan struktur organisasi, kompetensi dan strategi yang akan ditempuh adalah rencana kerja yang tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Selanjutnya untuk indikator adanya pengembangan jumlah dan mutu sumberdaya hambatannya yaitu sarana prasarana yang belum lengkap karena kurangnya anggaran yang ada sehingga sumberdaya sarana prasarana belum terpenuhi. Kemudian hambatan yang terjadi pada indikator adanya interaksi entitas organisasi dengan pemangku kepentingan yang lain yaitu kurang baiknya komunikasi dan kerjasama antara entitas organisasi dengan pemangku kepentingan yang lain.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang timbul pada dimensi penguatan kapasitas entitas (kelembagaan) terkait ketiga indikator tersebut yaitu dengan memaksimalkan rencana kerja yang sudah dibuat dengan meneliti kembali sektor-sektor mana saja yang harus diperbaiki

sehingga tidak akan ada permasalahan ketika di lapangan. Selanjutnya dengan memaksimalkan APBDes agar pembangunan sarana prasarana BUMDes dapat terlaksana. Kemudian dengan mengadakan musyawarah antar lembaga supaya komunikasi berjalan dengan baik dan dapat mengadakan kerjasama antar lembaga.

### **3. Penguatan Kapasitas Sistem (Jejaring)**

Perkembangan zaman telah menunjukkan pentingnya sistem/jejaring antar pemangku kepentingan. Bahkan jejaring telah berkembang menjadi sumberdaya yang harus terus menerus dikembangkan demi terwujudnya tujuan organisasi/individu. Oleh karena itu penguatan kapasitas sistem/jejaring didalam organisasi harus diterapkan, karena hal ini membuat tercapainya tujuan organisasi.

Salah satu unsur yang mempengaruhi keberhasilan pemberdayaan yaitu penguatan kapasitas sistem (jejaring) dengan indikator adanya pengembangan interaksi antar entitas (organisasi) dalam sistem dari setiap organisasi dan adanya interaksi dengan entitas (organisasi) di luar sistem dari setiap organisasi.

Berdasarkan hasil penelitian, dari ketiga indikator menunjukkan bahwa dimensi Penguatan Kapasitas Entitas (Kelembagaan) belum berjalan dengan baik. Hal ini dilihat dari interaksi dengan organisasi didalam sistem masih terdapat kekurangan seperti belum terjalinnya kerjasama dengan

yang lain, hal yang menyebabkan belum terjalinnya kerjasama yaitu komunikasi yang tidak berjalan dengan baik. Kemudian untuk indikator adanya interaksi dengan entitas di luar sistem yaitu memang belum berjalan dengan baik dan belum adanya kerjasama dengan organisasi yang lain, hal ini dapat dilihat dari cara kerja anggota BUMDes yang belum sepenuhnya giat untuk melakukan kerjasama tersebut.

Hal tersebut tidak sesuai dengan pendapat dari Dhal (Mardikanto 2020 : 34) mengatakan bahwa : “Pemberdayaan dapat di artikan sebagai upaya meningkatkan kekuatan atau kemampuan seseorang untuk mempengaruhi pihak lain yang sebenarnya tidak dikehendaki oleh pihak lain”.

Berdasarkan teori di atas dapat diketahui bahwa setiap organisasi harus mampu untuk mempengaruhi pihak yang lain supaya dapat terjalin kerjasama yang baik, jika kemampuan organisasi dalam mempengaruhi pihak lain sudah berhasil maka organisasi yang sedang dijalankan akan berkembang. Dalam pengembangan interaksi antar entitas dalam sistem belum sesuai dengan teori yang sudah disebutkan di atas karena organisasi belum mempunyai kemampuan dan kekuatan untuk dapat mempengaruhi pihak lain supaya dapat bekerjasama.

Hambatan pada dimensi penguatan kapasitas sistem (jejaring) yaitu pada indikator adanya pengembangan interaksi antar entitas (organisasi) dalam sistem dari setiap

organisasi adalah belum tersusunnya aturan kerjasama sehingga belum mengadakan kerjasama yang baik. Kemudian pada indikator adanya interaksi dengan entitas (organisasi) di luar sistem dari setiap organisasi yaitu karena kurangnya modal untuk melakukan kerjasama yang disediakan oleh BUMDes dan waktu yang sulit untuk di aturnya.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang timbul pada dimensi penguatan kapasitas sistem (jejaring) yaitu untuk indikator adanya pengembangan interaksi antar entitas (organisasi) dalam sistem dari setiap organisasi adalah dengan membuat rancangan-rancangan peraturan kerjasama dengan pihak ke 3 yang telah disepakati dalam musyawarah desa. Kemudian untuk indikator adanya interaksi dengan entitas (organisasi) di luar sistem dari setiap organisasi yaitu dengan cara memaksimalkan modal yang tersedia seminimal mungkin agar tercukupi untuk semua kebutuhan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian terkait Pembedayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sari Makmur Oleh Pemerintah Desa Sidasari Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap dapat disimpulkan bahwa Pembedayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sari Makmur Oleh Pemerintah Desa Sidasari Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap belum berjalan dengan baik. Dari tiga dimensi yang dijadikan sebagai identifikasi

masih ditemukan beberapa hambatan. Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara juga diperoleh jawaban bahwa tiga dimensi yang dijadikan sebagai identifikasi masih belum berjalan dengan baik yaitu tiga dimensi yang terdiri dari dimensi penguatan kapasitas individu, dimensi penguatan kapasitas entitas (kelembagaan) dan dimensi penguatan kapasitas sistem (jejaring), dari ketiga dimensi tersebut masih mempunyai beberapa hambatan yang belum teratasi.

Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam Pembedayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sari Makmur Oleh Pemerintah Desa Sidasari Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap berdasarkan hasil wawancara dan observasi dengan para informan yaitu anggaran yang masih belum mencukupi untuk melakukan kegiatan pelatihan, anggota BUMDes yang masih lebih mengutamakan kepentingan yang lain dibanding kepentingan BUMDes, rencana kerja yang belum dilakukan karena masih kurang maksimalnya interaksi dari anggota BUMDes dengan pihak lain, sarana dan prasarana yang masih belum terpenuhi karena anggaran yang tidak mencukupi, kurangnya komunikasi antar lembaga, dan belum adanya kerjasama dengan pihak yang lain karena belum tersusunnya aturan kerjasama serta kurangnya modal yang tersedia.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam Pembedayaan

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sari Makmur Oleh Pemerintah Desa Sidasari Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap berdasarkan hasil wawancara dan observasi yaitu dengan mengoptimalkan pendapatan asli desa supaya pelaksanaan pelatihan anggota BUMDes terlaksana supaya anggota mengerti mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan oleh anggota BUMDes, memaksimalkan rencana kerja dengan meneliti kembali sektor-sektor mana saja yang harus dijadikan prioritas yang akan dilaksanakan ditahun yang akan datang supaya rencana kerja cepat terealisasi, akan memaksimalkan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) untuk pembangunan sarana prasarana BUMDes, mengadakan musyawarah antar lembaga supaya terjalin komunikasi yang baik, dan membuat rancangan-rancangan peraturan kerjasama dengan pihak lain serta memaksimalkan modal seminimal mungkin.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Hikmat, Harry. 2013. Strategi Pemberdayaan Masyarakat. Bandung : Humaniora.
- Huda, Ni'matul. Hukum Pemerintahan Desa dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi. Malang : Setara
- Ikhwanasyah, Isis, dkk. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Strategi Pemberdayaan Potensi BUMDes. Bandung : Buku-Buku Ilmu Hukum.
- Mardikanto, Totok, dan Poerwoko Soebiato. 2020. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta cv.
- Solekhan, Moch. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat. Malang : Setara Press.
- Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&B. Bandung : Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2014. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Bandung : PT Refika Aditama.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
- PP Nomor 72 tahun 2005
- PP Nomor 11 Tahun 2021